



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DODOK DWI HANDOKO
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH
3. NHK : 432112

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.372.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
2. Tanah Seluas 1.746 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 272.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **560.000.000**

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, KAWASAKI W 175 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
5. MOTOR, ROYAL ENFIELD CLASSIC 500 CC CARBURATOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.000.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **250.000.001**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.274.984.953**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **100.000.000**

Sub Total **Rp.** **5.556.984.954**



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 5.556.984.954

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARIHOT TARIGAN**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN UMUM**
3. NHK : **201360**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.147.500.000

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 97.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 198 m2/250 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 44 m2/44 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 442.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 425.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.214.500.000

III. HUTANG Rp. 60.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.154.500.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LAILA CHAIRANI
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA
3. NHK : 112413

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.130.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/101 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.555.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/123 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI , Rp. 2.575.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 300.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV PRESTISE 1,5 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 284.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 990.564.900

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 437.133.281

F. HARTA LAINNYA Rp. 100.000.000

Sub Total Rp. 5.957.698.181

III. HUTANG Rp. 42.402.456

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.915.295.725

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG LESTANTO NOTOSOEDIRO RADEN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENILAIAN
3. NHK : 889566

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 260.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 131.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
57.000.000
2. MOBIL, SUZUKI SWIFT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
60.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 13.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 965.804.327

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 162.812.762

F. HARTA LAINNYA Rp. 100.302.500

Sub Total Rp. 1.632.919.589

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.632.919.589

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GATOT MUHARTO
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PIUTANG NEGARA
3. NHK : 150176

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/132 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 309.500.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, KAWASAKI W175 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000
5. MOTOR, KAWASAKI W175 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
6. MOTOR, YAMAHA X MAX 250 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 320.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.653.188

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.732.153.188



III. HUTANG

Rp. 32.118.568

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.700.034.620

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : INA HERMADIANA
2. Jabatan : KEPALA SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN ANALISIS DATA LELANG
3. NHK : 788748

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 902.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 902.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 149.700.000

1. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
108.000.000
2. MOTOR, VESPA LX125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
20.200.000
3. MOTOR, HONDA L1F02N37L1 A/T SOLO Tahun 2024, HASIL
SENDIRI Rp. 21.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 63.480.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 97.526.795

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.212.806.795

III. HUTANG Rp. 70.298.600

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.142.508.195

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : THAMRIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG KEPATUHAN INTERNAL, HUKUM, DAN INFORMASI
3. NHK : 418834

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/125 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 233.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT BEBEK Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, SUZUKI XL7 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 311.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.214.558

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.706.814.558

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.706.814.558

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPRAPNO
2. Jabatan : PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PEMERINTAH MADYA
3. NHK : 432074

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **991.889.000**

1. Tanah Seluas 116 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 87.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/160 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp. 429.889.000
3. Tanah Seluas 175 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 3.000 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/30 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 195 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **279.000.000**

1. MOTOR, SUZUKI SMASH SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



4. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. MOBIL, MAZDA 2 15L HB S A/T MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 14.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	126.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	496.612.739
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.893.501.739
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.893.501.739

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.